



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DISPERMADES PPKB KABUPATEN BANJARNEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga kita dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dispermades PPKB Tahun 2025. Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra Dispermades PPKB Tahun 2023-2026 dan disusun berdasarkan visi dalam RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yaitu :

"BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN"

Pembangunan desa sebagai salah satu wilayah terpencil masyarakat memiliki peran strategis sebagai daya ungkit kemandirian dan kesehjahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut mengingat sebagian besar wilayah merupakan perdesaan. Saat ini jumlah desa di Kabupaten Banjarnegara yaitu 266 desa dan 12 sisanya merupakan kelurahan.

Pembangunan kemandirian daerah juga didukung oleh pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejajhreraan keluarha sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renja Dispermades PPKB Tahun 2025 ini diharapkan mampu menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja Dispermades PPKB dalam urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecnana. Kami mengharapkan dukungan dari stakeholder, jajaran pemerintahan kecamatan sampai dengan desa agar target Rencana Kerja Tahun 2025 bisa tercapai sebagaimana yang ditetapkan.

Banjarnegara, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara,



Hendro Cahyono, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681130 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 12
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra DispermadesPPKB Tahun 2023-2026.....	12
2. 2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara	36
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DispermadesPPKB	41
2. 4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara	44
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	69
 BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 77
3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	77
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara.....	81
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 82
 BAB V. PENUTUP	 86
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	86
5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	87
5.3. Rencana Tindak Lanjut	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Tahun 2023 ...	18
Tabel.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023	37
Tabel 3.	Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025	45
Tabel 4.	Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2025 (Aspirasi Masyarakat)	69
Tabel 5.	Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan Tahun 2025 (Pokok Pikiran)	72

BAB I.

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun Lalu, dan hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju yang disusun dalam

rancangan awal Renja Perangkat daerah dengan renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian ssaran Renstra Perangkat daerah.

1. 2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Perunurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
26. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
30. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara;
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2025 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
- c. Mendokumentasikan rencana kerja yang terukur beserta pendanannya
- d. Mewujudkan akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. 4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang pengertian renja, keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan sebelumnya serta arti strategis renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya dan landasan hukum lainnya yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman penyusunan dokumen Renja DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Renja Dispermades PPKB Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat gambaran pokok dan garis besar dokumen Renja DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan;

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi,

dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan DispermadesPPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada DispermadesPPKB maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi DispermadesPPKB dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan saasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra DispermadesPPKB dalam mendukung visi misi Kepala Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi program dan kegiatan serta anggaran dalam rangka menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 terdiri dari 8 program, 17 kegiatan, dan 56 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp29.599,582.561,00 dengan fokus utama pada Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah serta Meningkatnya akses pembangunan manusia. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Urusan Pemberdayaan masyarakat desa

- a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum optimal;
- b. Belum optimalnya pengembangan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

BAB III. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, keuangan, profil, penataan batas dan tata ruang desa;

2. Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- a. Belum terkendalinya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*);
- b. Masih tingginya Pasangan Usia Subur ber-KB tapi tidak terpenuhi (*Unmeet need*);
- c. Masih rendahnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja, dan lansia dalam kegiatan pengasuhan

dan pembinaan melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih adanya kasus kelahiran remaja usia 15-19 tahun.

Dari 8 program, 17 kegiatan, dan 56 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 8 program, 17 kegiatan, dan 56 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp25.599.582.561,00

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 8 program, 17 kegiatan, dan 56 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp21.537.630.120,00. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Rp22.523.948.490,00.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2023 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Persentase peserta KB aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Masih adanya mitos di masyarakat terkait alat dan obat kontrasepsi, sehingga masyarakat takut untuk ber-KB;
 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan KB di daerah tertinggal dan terpencil;
 3. Keyakinan dalam masyarakat untuk banyak anak banyak rejeki, sehingga PUS tidak ber -KB;
 4. Belum optimalnya pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, sehingga PUS tidak langsung ber -KB.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi
1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari Persentase tingkat perkembangan desa, Persentase tingkat perkembangan BUMDes, Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat, Nilai surey kepuasan masyarakat, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari Angka Kelahiran Total (TFR), Persentase PUS peserta KB MKJP, Menurunnya PUS usia 19 tahun (<20 Tahun).

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Pemahaman desa terkait PMK Nomor 190 Tahun 2021 sudah cukup baik, khususnya pada indikator wajib yang mempunyai bobot tinggi dalam meraih Alokasi Kinerja, yakni perubahan skor dan perubahan status desa dalam IDM. Hal ini berpengaruh pada pengisian indikator penilaian yang lebih obyektif;
 - b) Adanya pendampingan dan koordinasi yang berkelanjutan baik oleh aparat pemerintah kabupaten

maupun dibantu oleh Tim Tenaga Ahli bagi Desa sebanyak 6 orang, Pendamping Desa (PD) sebanyak 48 orang dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebanyak 65 orang sehingga menjangkau seluruh wilayah desa di Kabupaten Banjarnegara;

- c) Dukungan, fasilitasi dan motivasi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan dalam hal ini pengembangan BUMDes. Implentasi dukungan yang sudah diberikan diantaranya berupa peningkatan kapasitas dan penyertaan modal BUMDes;
 - d) Dukungan dan support dari Kepala Desa setempat selaku penasehat sekaligus pengambil kebijakan desa serta tokoh masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan unit usaha BUMDesa;
 - e) Tradisi gotong-royong di desa-desa, terutama desa lokus TMMD masih kuat sehingga warga sukarela memberikan lahan / tanah dan sewa alat berat bagi pelebaran ruas jalan TMMD. Didorong kepentingan sosial ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (transaksi perdagangan hasil bumi) maupun memudahkan aktivitas ke sekolah dan kesehatan.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Terlaksananya kegiatan Promosi dan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) Program KKBPK kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun luar ruangan;
 - b) Tercukupinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi melalui penyediaan, pemetaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara tepat waktu dan sasaran kepada 56 fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang tersebar di 20 kecamatan se Kabupaten Banjarnegara;

- c) Peningkatan pembinaan pelayanan KB Pasca persalinan dan keguguran melalui pembinaan kesehatan reproduksi;
- d) Peningkatan pendewasaan usia kawin pertama untuk memperpendek masa fertilitas perempuan. Median usia perkawinan pertama tahun 2022 yaitu 27 tahun serta persentase PUS kurang dari 20 tahun sebanyak 1,88 persen;
- e) Ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB bagi Petugas Penyuluh KB dalam melaksanakan pelayanan pembinaan KB;
- f) Pelayanan yang tepat sasaran dan pembinaan yang berkesinambungan mulai dari Petugas Penyuluh KB, Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD sehingga pembinaan dan penggerakan KB menjangkau seluruh wilayah;
- g) Meningkatnya pengetahuan SDM terutama bidan desa dalam memberikan KIE KB Pasca Persalinan;
- h) Kesadaran pasangan usia subur yang semakin tinggi dalam penggunaan alat kontrasepsi modern sehingga tingkat kegagalan semakin rendah;
- i) Model pengembangan Kampung KB Berkualitas yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di kampung tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk capaian target kinerja yang tidak tercapai yaitu persentase KB Aktif. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab khususnya yang berkaitan dengan persentase KB aktif, diantaranya :

1. Melaksanakan indentifikasi resiko serta menyusun rencana tindak pengendalian;
2. Melaksanakan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait melalui berbagai media dengan melibatkan mitra kerja tokoh masyarakat/tokoh agama;

3. Melaksanakan peningkatan kapasitas, monitoring dan fasilitasi pelayanan KB di daerah tertinggal dan terpencil;
4. Mendorong pelayanan KB mandiri dan mendorong Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang belum berjejaring dengan BPJS/Faskes Induk agar bisa menjadi K/0/KB dan aktif melayani KB;
5. Monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan untuk mencegah *Stock Out* Alokon bersama dengan Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok Alokon;
6. Penguatan kerjasama dengan *stakeholder* dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi penggerakan KB terutama di wilayah dan sasaran khusus pada kegiatan momentum;

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlayannya administrasi perkantoran	100%	48 Bulan	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	48 Bulan	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	48 Bulan	100%	100%	100%	-	-	-
2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	48 Bulan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	-	-	-
2.13.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan yang disusun	12 Dokumen	48 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-
2.13.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	5 Dokumen	48 Bulan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	-	-	-
2.13.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan	2 Paket	48 Bulan	2 Paket	2 Paket	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.13.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	48 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
2.13.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
2.13.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
2.13.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan pembersih kantor	12Bulan	48 Bulan	12Bulan	12Bulan	100%	-	-	-
2.13.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yan terpenuhi	12Bulan	48 Bulan	12Bulan	12Bulan	100%	-	-	-
2.13.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	1 Paket	48 Bulan	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
2.13.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipenuhi	20 Unit	48 Bulan	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-
2.13.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor	32 Orang	48 Bulan	32 Orang	32 Orang	100%	-	-	-
2.13.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlsh paket pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Paket	48 Bulan	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.13.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	11 Unit	48 Bulan	11 Unit	11 Unit	100%	-	-	-
2.13.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	48 Bulan	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-
2.13.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Unit	48 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
2.13.01.2	Program Penataan Desa	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	30%	48 Bulan	30%	30%	100%	-	-	-
2.13.01.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang didampingi bankeu sarana prasarana	38 Desa	48 Bulan	38 Desa	38 Desa	100%	-	-	-
2.13.01.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD	654 Juta	48 Bulan	654 Juta	654 Juta	100%	-	-	-
		Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi (infrastruktur)	35 Desa	48 Bulan	35 Desa	35 Desa	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-13.03	Program Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan, kota-kota menengah dan besar	100%	48 Bulan	100%	100%	100%	-	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	278 Desa/ Kelurahan	48 Bulan	278 Desa/ Kelurahan	278 Desa/ Kelurahan	100%	-	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih pemetaan kawasan	266 Orang	48 Bulan	266 Orang	266 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen kawasan perdesaan yang tersusun	4 Dokumen	48 Bulan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	-
2-13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	48 Bulan	90%	90%	100%	-	-	-
2-13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan administrasi desa	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang didampingi dan dimonitoring dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi (ketahanan masyarakat)	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi	2 Regulasi	48 Bulan	2 Regulasi	2 Regulasi	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-13.04.2.01.003	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah kader PMD yang dilatih	240 Orang	48 Bulan	240 Orang	240 Orang	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.004	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi administrasi keuangan desa	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan Dana Desa	100 Desa	48 Bulan	100 Desa	100 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah desa yang didampingi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan kabupaten (BPUS)	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	110 Orang	48 Bulan	110 Orang	110 Orang	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.008	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang dilatih/ terdampingi manajemen BUMDes	55 BUMDes	48 Bulan	55 BUMDes	55 BUMDes	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-13.04.2.01.010	Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang difasilitasi pengangkutan	60 Orang	48 Bulan	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah perangkat desa yang difasilitasi pemberhentian	60 Orang	48 Bulan	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.011	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan profil desa	25 Desa	17 Desa	8 Desa	8 Desa (Pwj Klampok)	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.013	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelesaian pemanfaatan tanah kas desa	5 Desa	48 Bulan	5 Desa	5 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah desa yang dilatih manajemen aset desa	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.014	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dilatih	266 Desa	48 Bulan	266 Desa	266 Desa	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.015	Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi oenataan batas desa	30 Desa	48 Bulan	30 Desa	30 Desa	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.016	Sub Kegiatan Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah dokumen penyusunan laporan (Kepala Desa/LPPDes)	266 Dokumen	48 Bulan	266 Dokumen	266 Dokumen	100%	-	-	-
2-13.04.2.01.018	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terpilihnya desa berprestasi	3 Desa	48 Bulan	3 Desa	3 Desa	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya strata posyandu	51%	48 Bulan	51%	51%	100%	-	-	-
		Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa	85%	48 Bulan	85%	85%	100%	-	-	-
		Persentase tersedianya dokumentasi Kreativitas dan Inovasi	70%	48 Bulan	70%	70%	100%	-	-	-
		Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	30%	48 Bulan	30%	30%	100%	-	-	-
2-13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang difasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	78 Desa/ Kelurahan	48 Bulan	78 Desa/ Kelurahan	78 Desa/ Kelurahan	100%	-	-	-
		Jumlah pengurus / kader lembaga kemasyarakatan yang dilatih						-	-	-
		Jumlah Inovasi TTG yang terdokumentasi	3 Karya	48 Bulan	3 Karya	3 Karya	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah desa yang dilaksanakan pencaangan kegiatan kegotongroyongan	1 Desa	48 Bulan	1 Desa	1 Desa	100%	-	-	-
		Jumlah perempuan yang dilatih	50 Orang	48 Bulan	50 Orang	50 Orang	100%	-	-	-
2-13.05.2.01.002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK< Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang difasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	278 Desa/ Kelurahan	48 Bulan	278 Desa/ Kelurahan	278 Desa/ Kelurahan	100%	-	-	-
2-13.05.2.01.003	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK< Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang dilatih	20 Posyandu	48 Bulan	20 Posyandu	20 Posyandu	100%	-	-	-
		Jumlah lembaga RT yang difasilitasi	5524 RT	48 Bulan	5524 RT	5524 RT	100%	-	-	-
		Jumlah lembaga RW yang difasilitasi	1343 RW	48 Bulan	1343 RW	1343 RW	100%	-	-	-
		Jumlah lembaga PKK yang difasilitasi	20 PKK	48 Bulan	20 PKK	20 PKK	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah Karang Taruna yang difasilitasi	278 Karang Taruna	48 Bulan	278 Karang Taruna	278 Karang Taruna	100%	-	-	-
		Jumlah LPM yang difasilitasi	278 LPM	48 Bulan	278 LPM	278 LPM	100%	-	-	-
2-13.05.2.01.005	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang dilatih/terdampingi ketrampilan nit usaha BUMDes	55 Desa	48 Bulan	55 Desa	55 Desa	100%	-	-	-
2-13.05.2.01.006	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah karya peserta yang memenuhi kriteria TTG	10 Karya	48 Bulan	10 Karya	10 Karya	100%	-	-	-
2-13.05.2.01.007	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan BBGRM	26 Juta Rupiah	48 Bulan	26 Juta Rupiah	26 Juta Rupiah	100%	-	-	-
2-13.05.2.01.009	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK (Kecamatan, Desa dan Kelurahan) yang dibina	36 Desa/ Kelurahan	48 Bulan	36 Desa/ Kelurahan	36 Desa/ Kelurahan	100%	-	-	-
		Jumlah perempuan yang dilatih dalam bidang usaha ekonomi kreatif	20 Orang	48 Bulan	20 Orang	20 Orang	100%	-	-	-
2-14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2.30%	48 Bulan	2.30%	2.30%	100%	-	-	-
		Persentase Pemetaan Pengendalian Penduduk dan KB	100%	48 Bulan	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Persentase Kepala keluarga yang dilakukan pendataan mikro keluarga	100%	48 Bulan	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase informasi KKBPK	2.30%	48 Bulan	2.30%	2.30%	100%	-	-	-
2-14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan sinkronisasi pengendalian kependudukan	4 Dok/MoU	48 Bulan	4 Dok/MoU	4 Dok/MoU	100%	-	-	-
2-14.02.2.01.010	Sub Kegiatan Impelementasi Pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Impelementasi Pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal yang terlaksana	2 Sekolah	48 Bulan	2 Sekolah	2 Sekolah	100%	-	-	-
2-14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kependudukan yang tersusun	2 Paket	48 Bulan	2 Paket	2 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan pendataan keluarga	2 Kali	48 Bulan	2 Kali	2 Kali	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen KKBPK	12 Dokumen	48 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-
2-14.02.2.02.001	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah dokumen parameter kependudukan	1 Dokumen	48 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
2-14.02.2.02.011	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah kepala keluarga yang dilakukan	348.335 KK	48 Bulan	348.335 KK	348.335 KK	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		pendataan								
2-14.02.2..02.013	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendai;ian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Feed Back (Laporan Bulanan)	12 Dokumen	48 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-
2-14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.30%	48 Bulan	2.30%	2.30%	100%	-	-	-
2-14.03.02.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB	4 Paket	48 Bulan	4 Paket	4 Paket	100%	-	-	-
2-14.03.02.01.001	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang mendukung program KB dan melakukan KIE	12 Dokuemn	48 Bulan	12 Dokuemn	12 Dokuemn	100%	-	-	-
2-14.03.02.01.002	Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen KIE program Bangsa Kencana sesuai kearifan budaya lokal	-	-	-	-	16 Dokumen	-	-	-
2-14.03.02.01.004	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak an Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah pemutaran Film	30 Jumlah Pemutaran Film	48 Bulan	30 Jumlah Pemutaran Film	30 Jumlah Pemutaran Film	100%	-	-	-
		Jumlah spot radio (iklan masyarakat)	365 Jam Siar	48 Bulan	365 Jam Siar	365 Jam Siar	100%	-	-	-
		Jumlah talk Show	24 Jam Siar	48 Bulan	24 Jam Siar	24 Jam Siar	100%	-	-	-
		Jumlah baliho uanh	22 Buah	48 Bulan	22 Buah	22 Buah	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		dipelihara								
		Jumlah leaflet	3000 Lembar	48 Bulan	3000 Lembar	3000 Lembar	100%	-	-	-
		Jumlah layur KB	116 Buah	48 Bulan	116 Buah	116 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah Banner	22 Buah	48 Bulan	22 Buah	22 Buah	100%	-	-	-
		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Pendewasaan PUP lewat media tradisional	5 Kegiatan	48 Bulan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah KIE penggerakan mitra kerja KB (massa)	1000 Orang	48 Bulan	1000 Orang	1000 Orang	100%	-	-	-
2-14.03.02.01.006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah regulasi/kebijakan yang difasilitasi untuk dilaksanakan Program KKBPK					100%	-	-	-
2-14.03.02.01.007	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapa bantuan operasional KB	20 Balai	48 Bulan	20 Balai	20 Balai	100%	-	-	-
2-14.03.02.01.008	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah audit stunting	2 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100%			
2-14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB?PLKB)	Jumlah IMP Mandiri di Desa	2293 Orang	48 Bulan	2293 Orang	2293 Orang	100%	-	-	-
2-14.03.2.02.004	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Penggerakan Masyarakat (IMP)	Jumlah IMP yang aktif di desa/kelurahan	7194 Orang	48 Bulan	7194 Orang	7194 Orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah IMP dan Pengelola Program Terbaik	3 Kategori	48 Bulan	3 Kategori	3 Kategori	100%	-	-	-
		Jumlah IMP yang difasilitasi operasional pembinaan	278 Orang	48 Bulan	278 Orang	278 Orang	100%	-	-	-
2-14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor KB yang terlayani	184382 Orang	48 Bulan	184382 Orang	184382 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah PUS peserta KB MKJP	53010 Orang	48 Bulan	53010 Orang	53010 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	16265 Orang	48 Bulan	16265 Orang	16265 Orang	100%	-	-	-
2-14.03.2.03.001	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah KKB yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi	42 KKB	48 Bulan	42 KKB	42 KKB	100%	-	-	-
2-14.03.2.03.003	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS	292688 Orang	48 Bulan	292688 Orang	292688 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta KB IUD yang difasilitasi	18351 Orang	48 Bulan	18351 Orang	18351 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta KB implan yang difasilitasi	18527 Orang	48 Bulan	18527 Orang	18527 Orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah peserta KB MOW yang difasilitasi	10274 Orang	48 Bulan	10274 Orang	10274 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta KB MOP yang difasilitasi	1897 Orang	48 Bulan	1897 Orang	1897 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta KB suntik yang difasilitasi	96204 Orang	48 Bulan	96204 Orang	96204 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta KB pil yang difasilitasi	16070 Orang	48 Bulan	16070 Orang	16070 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah peserta KB kondom yang difasilitasi	2353 Orang	48 Bulan	2353 Orang	2353 Orang	100%	-	-	-
2-14.03.2.03.004	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta mengalami komplikasi berat/kegagalan akibat pemakaian KB MKJP yang mendapat ayoman	10020 Orang	48 Bulan	10020 Orang	10020 Orang	100%	-	-	-
2-14.03.2.03.006	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana pelayanan KB yang diadakan	1 Paket	48 Bulan	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
2-14.03.2.03.008	Ub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah KKB yang mendapatkan visitasi dan pembinaan	43 KKB	48 Bulan	43 KKB	43 KKB	100%	-	-	-
2-14.03.2.03.012	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat sosialisasi teknik KIE KB		48 Bulan			100%	-	-	-
2-14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemsyarakatan Tingkat Daerah						100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kbaupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB									
2-14.03.2.04.003	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						100%	-	-	-
2-14.04	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota BKR	33.82%	48 Bulan	33.82%	33.82%	100%	-	-	-
		Persentase keluarga yang menjadi anggota BKL	41.84%	48 Bulan	41.84%	41.84%	100%	-	-	-
		Persentase keluarga yang menjadi anggota BKB	58.40%	48 Bulan	58.40%	58.40%	100%	-	-	-
		Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga	90.00%	48 Bulan	90.00%	90.00%	100%	-	-	-
		Persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	25.36%	48 Bulan	25.36%	25.36%	100%	-	-	-
		Persentase PIK Remaja Tegar	26.15%	48 Bulan	26.15%	26.15%	100%	-	-	-
		Persentase PUS yang menikah usia 15019 tahun	2.87%	48 Bulan	2.87%	2.87%	100%	-	-	-
2-14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok remaja yang dibina	10 Sekolah	48 Bulan	10 Sekolah	10 Sekolah	100%	-	-	-
		Jumlah kelompok PIK yang dibina	12 Kelompok	48 Bulan	12 Kelompok	12 Kelompok	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah PUS yang menjadi anggota kelompok BKR	8170 Kelompok	48 Bulan	8170 Kelompok	8170 Kelompok	100%	-	-	-
		Jumlah PUS yang menjadi anggota kelompok BKL	10332 Kelompok	48 Bulan	10332 Kelompok	10332 Kelompok	100%	-	-	-
		Jumlah PUS yang menjadi anggota kelompok BKB	15373 Kelompok	48 Bulan	15373 Kelompok	15373 Kelompok	100%	-	-	-
		Jumlah pendamping kelompok bina keluarga	278 Orang	48 Bulan	278 Orang	278 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah keluarga (PUS) yang menjadi anggota UPPKS	62604 Orang	48 Bulan	62604 Orang	62604 Orang	100%	-	-	-
2-14.04.2.01002	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang diadakan	1 Paket	48 Bulan	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
2-14.04.2.01003	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota kelompok BKR yang dibina	60 Orang	48 Bulan	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah anggota kelompok BKL yang dibina	60 Orang	48 Bulan	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah anggota kelompok BKB yang dibina	60 Orang	48 Bulan	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah pendamping kelompok bina keluarga yang dilatih	250 Orang	48 Bulan	250 Orang	250 Orang	100%	-	-	-
2-14.04.2.01004	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader kelompok UPPKS yang dilatih	375 Kelompok	48 Bulan	375 Kelompok	375 Kelompok	100%	-	-	-
2-14.04.2.01006	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok PIK Remaja yang difasilitasi penyediaan operasional	10 Kelompok	48 Bulan	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	-	-	-
		Jumlah kelompok BKB yang difasilitasi penyediaan operasional	10 Kelompok	48 Bulan	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	-	-	-
2-14.04.2.01007	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota PIK Remaja yang difasilitasi	66 Kelompok	48 Bulan	66 Kelompok	66 Kelompok	100%	-	-	-
		Jumlah Pendidik Sebaya yang difasilitasi	150 Orang	48 Bulan	150 Orang	150 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah Konselor Sebaya yang difasilitasi	78 Orang	48 Bulan	78 Orang	78 Orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2-14.04.2.01008	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah penyuluhan reproduksi remaja usia 15 sampai dengan 19	10 Kegiatan	48 Bulan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlag anggota Saka Kencana	40 Orang	48 Bulan	40 Orang	40 Orang	100%	-	-	-
		Jumlah Duta Generasi Berencana yang terpilih	3 Orang	48 Bulan	3 Orang	3 Orang	100%	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 9 (sembilan) sasaran yang diukur dengan 14 (empat belas) Indikator. Berdasarkan skala pengukuran kinerja maka capaian kinerja dari 14 (empat belas) indikator kinerja yaitu 11 (sebelas) indikator kinerja melebihi 100 persen (sangat baik), 3 (tiga) indikator dalam skala 75 - 100 persen (baik). Rincian capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Kategori sangat baik yaitu : 1). Persentase tingkat perkembangan desa, 2). Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD, 3). Persentase tingkat perkembangan BUMDes, 4). Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat, 5). Angka Kelahiran Total (TFR), 6). Persentase PUS peserta KB MKJP, 7). Menurunnya PUS usia 19 tahun (<20 Tahun), 8). Persentase kesertaan anggota tribina, 9). Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera, 10). Nilai survey kepuasan masyarakat, 11). Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Kategori baik yaitu : 1). Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun, 2). Persentase peserta KB aktif, 3). Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Keluarga Berencana untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas;

Secara umum, kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023 telah berhasil dengan baik, namun demikian perlu untuk terus melaksanakan peningkatan kinerja agar semakin bisa bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar													
No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
I.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	IKU	Angka	77	77,5	78	78,5	76,28	77,42	73,45	73,95	
1.	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	IKU	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
II.	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	-	IKU	Desa	3	6	7	8	2	2	6	6	
	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	-	IKK	%	37	37,5	38	38,5	36,95	36,96	37,02	37,5	
	Jumlah kerjasama antar desa	-	IKK	MoU	4	5	6	7	2	3	4	5	
	Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	-	IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	-	IKK	%	50	65	85	100	28,57	28,57	56,39	65	
	Jumlah BUMDes yang berkembang	-	IKK	BUMDes	6	7	8	9	NA	NA	18	18	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi	-	IKK	%	45	50	55	60			45	50	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	aktif dalam program pemberdayaan masyarakat												
	Persentase pengembangan ekonomi desa	-	IKK	%	5	10	15	20	-	-	10	10	
	Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	-	IKK	%	2	3	4	5	-	-	2,63	3	
III.	Angka kelahiran Total (TFR)	-	IKU	Angka	2,08	2,06	2,04	2,02	1,94	1,75	165	2,02	
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	IKK	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	3	
	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	-	IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	-	IKK	%	76,59	77,09	77,59	78,09	79,93	77,20	81,24	77,09	
	Persentase tingkat keberlangsungan	-	IKK	%	15	14	12	10	-	-	4,88	4,88	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	pemakaian kontrasepsi												
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	IKK	%	32,58	33,08	33,58	34,08	32,08	32,42	35,10	33,08	
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	-	IKK	%	6,96	6,94	6,92	6,9	6,98	6,99	6,37	6,94	
IV.	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	-	IKU		22,36	11,52	11,51	11,50	22,66	23,24	11,52	11,52	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	IKK	%	75,99	76,01	76,03	76,05	-	-	86,59	86,59	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	IKK	%	61,5	61,52	61,54	61,56	57,40	58,40	82,17	61,52	
	Cakupan anggota	-	IKK	%	36,7	36,72	36,74	36,76	32,82	33,82	84,10	36,72	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK LPPD / IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
	Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB												
	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	-	IKK	%	50,72	50,74	50,76	50,78	-	-	88,92	88,92	
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	IKK	%	10	20	30	40	-	-	25,12	30	
V.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	IKU		83	84	85	86	81,61	82,87	83,53	84	
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	-	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam dua urusan, yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup dua urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah

- a. dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa di Tahun 2025, Dispermades PPKB tidak bisa secara langsung melaksanakan pembinaan dan pendampingan sebagaimana biasanya. Pembinaan, pendampingan dan pengawasan hanya dapat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka melalui desa-desa yang hadir ke kantor;
- b. Pendataan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Bangga Kencana belum bisa terdokumentasikan secara lengkap melalui sistem aplikasi New SIGA, karena Balai KB tidak melaksanakan update data secara rutin;
- c. Kurangnya jumlah tenaga lini lapangan pelayanan KB, khususnya Petugas Lapangan KB yang hanya berjumlah 30 orang sehingga satu orang PPKB mengampu 9 sampai dengan 10 desa binaan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

- a. Fasilitasi tukar menukar aset desa terhambat;
- b. Pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa tidak optimal;

- c. Fasilitasi perekrutan Perangkat Desa tidak bisa dilaksanakan;
- d. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah tentang desa tidak maksimal;
- e. Fasilitasi Penguatan Perencanaan partisipatif tidak maksimal;
- f. Kegiatan Pemberdayaan LKD tidak dapat dilaksanakan;
- g. Hasil pelaksanaan program Bangga Kencana tidak terdokumentasikan secara maksimal dan tidak bisa dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kegiatan;
- h. Pelaksanaan Program Bangga Kencana tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan sumberdaya manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

- 1. Memanfaatkan media daring dalam penyampaian informasi dan koordinasi;
- 2. Monitoring dan evaluasi terhadap update hasil program pelayanan KB;
- 3. Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia agar diperoleh hasil semaksimal mungkin.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal/sangat tertinggal;
2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa, yang ditandai dengan :
 - a. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
 - c. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa;
 - d. Masih rendahnya pengelolaan informasi desa;
3. Masih rendahnya kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, yang ditunjukkan dengan :
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di perdesaan;
 - b. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan. (output)
 - c. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa;
 - d. Masih kurangnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa.
4. Masih rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat dan desa yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
 - b. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;
 - c. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
 - d. Belum terdokumentasinya dan kurangnya implementasi kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
5. Kuantitas dan kualitas data rinci keluarga belum tersedia secara optimal;
6. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
7. Masih tinggi Total Fertility Rate (TFR);
8. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB;
9. Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;

10. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;
11. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
12. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi :

1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Terkendalinya angka kelahiran total;
4. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dispermades PPKB				26.349.584.645					13.257.322.930	
1.	Program Penunang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100%	7.043.787.645	Program Penunang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Banjarnegara	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100%	7.378.245.930	
			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100%				Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100%		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	25.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	37.000.000	
1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17 Dokumen	37.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Kegiatan Adminstrasi Keuangan perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.205.355.879	Kegiatan Adminstrasi Keuangan perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.205.356.130	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan (30 PNS + 8 PPPK)	5.155.840.879	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan (30 PNS + 8 PPPK)	5.155.841.130	
2)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.515.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.515.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah	100%	756.475.886	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah	100%	785.248.600	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	731.475.886	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	760.238.600	
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	100%	68.612.000.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	100%	288.894.000	
1)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	68.612.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	49 Unit	288.894.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kab. Banjarnegara	Prsentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	795.343.880	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kab. Banjarnegara	Prsentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	816.137.200	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	87.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	87.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	707.743.880	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	728.537.200	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	193.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	245.510.000	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Kendaraan	115.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjarnegara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	11 Kendaraan	115.510.000	
2)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	22 Unit	48.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	22 Unit	100.000.000	
3)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saana	Kab. Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	22 Unit	30.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saana	Kab. Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	22 Unit	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			
					7.214.077.000					5.244.077.000	
2.	Program Penataan Desa	Kab. Banjarnegara	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	38%	150.000.000	Program Penataan Desa	Kab. Banjarnegara	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat	38%	150.000.000	
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa	266 desa	150.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa	266 Desa	150.000.000	
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana desa	6 unit	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana desa	6 unit	150.000.000	
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah kerjasama antar desa	5 Dokumen	20.000.000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah kerjasama anatar desa	5 Dokumen	20.000.000	
3.1	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	5 Kawasan	20.000.000	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	5 Kawasan	20.000.000	
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan	4 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan	4 Dokumen	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kawasan Perdesaan		kawasan perdesaan			Kawasan Perdesaan		kawasan perdesaan			
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjarneg ara	Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	100%	5.136.232.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjarn egara	Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	100%	4.557.077.000	
			Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	75%				Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	75%		
			Jumlah BUMDes yang berkembang	8 Unit				Jumlah BUMDes yang berkembang	8 Unit		
4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjarneg ara	Jumlah desa yang difasiltasi pengelolaan administrasi desa	266 Desa	5.136.232.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Banjarn egara	Jumlah desa yang difasiltasi pengelolaan administrasi desa	266 Desa	4.557.077.000	
1)	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Banjarnega ra	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	801 Dokumen	3.800.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Banjarn egara	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	801 Dokumen	3.800.000.000	
5)	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Banjarnega ra	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	-	-	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Banjarn egara	Jumlah apaatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	40 Orang	60.000.000	
6)	Sub Kegiatan Pembinaan dan	Kab. Banjarnega	Jumlah dokumen hasil pembinaan	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan	Kab. Banjarn	Jumlah dokumen hasil pembinaan	1 Dokumen	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerjasama antar Desa	ra	dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa			Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerjasama antar Desa	egara	dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa			
8)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. banjarnegara	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	195 Laporan	2.000.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. banjarnegara	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	-	-	
10)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. banjarnegara	Jumlah Dokumen Profil Desa	-		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. banjarnegara	Jumlah Dokumen Profil Desa	266 Dokumen	30.000.000	
11)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	3 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	5 Dokumen	15.000.000	
12)	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	266 Orang	40.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Kab. Banjarnegara	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	266 Orang	50.000.000	
13)	Sub kegiatan fasilitasi Penataan dan Penegasan Batas desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	45 Desa (Mandiraja, Karangko bar, Kalibening)	140.000.000	Sub kegiatan fasilitasi Penataan dan Penegasan Batas desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	41 Desa (Batur, Wanayasa, Kalibening)	140.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15)	Sub Kegiatan fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	542.077.000	Sub Kegiatan fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	442.077.000	
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Banjarnegara	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan Masyarakat	55%	487.000.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Banjarnegara	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	55%	497.000.000	
			Persentase pengembangan ekonomi desa	15%		Persentase pengembangan ekonomi desa	15%				
			Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	4%		Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	4%				
5.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta	Kab. Banjarnegara	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa	65%	487.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat tingkat Daerah Provinsi serta	Kab. Banjarnegara	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa	65%	497.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah					Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah					
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen (Posyandu)	50.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	70.000.000	
2)	Sub Kegiatan fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Kab. Banjarnegara	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	3 Lembaga	75.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Kab. Banjarnegara	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	3 Lembaga	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya			Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lmebaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya			
3)	Sub Kegiatan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	8 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	8 Dokumen	20.000.000	
4)	Sub Kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	32.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Banjarnegara	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	32.000.000	
5)	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	36 Dokumen	300.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	36 Dokumen	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keluarga		Keluarga			Keluarga		Keluarga			
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kab. Banjarneg ara	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,04	12.091.720	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kab. Banjarn egara	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,04	635.000.000	
6.	Program Pengendalian Penduduk	Kab. Banjarneg ara	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan fomal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1 Dokumen	532.000.000	Program Pengendalian Penduduk	Kab. Banjarn egara	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan fomal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1 Dokumen	120.000.000	
			Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan	100%				Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan	100%		
6.1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkrpnisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam rangka	Kab. Banjarneg ara	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000	Kegiatan Pemaduan dan Sinkrpnisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam rangka	Kab. Banjarn egara	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Kuantitas Penduduk					Pengendalian Kuantitas Penduduk					
1)	Sub Kegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand design Pemangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand design Pemangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand design Pemangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand design Pemangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000	
6.2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	472.000.000	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
1)	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	12 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	12 Laporan	10.000.000	
2)	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	912 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	
3)	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan	480 Laporan	234.000.000	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Data Keluarga		Data Keluarga			Data Keluarga		Data Keluarga			
4)	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	200 Laporan	168.000.000	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Banjarnegara	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	77,59%	6.162.120.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Banjarnegara	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	77,59%	285.000.000	
			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	12%				Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	12%		
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%		
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,58%				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,58%		
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	6,92%				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	6,92%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			(unmet need)					terpenuhi (unmet need)			
7.1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Banjarnegara	Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangsa kencana	100%	1.770.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Banjarnegara	Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangsa kencana	100%	80.000.000	
1)	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	200.000.000	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	
2)	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan	5 Dokumen	126.000.000	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan	5 Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Elektronik serta Media Luar Ruang					Elektronik serta Media Luar Ruang			
3)	Sub Kegiatan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	27 Dokumen	54.000.000	Sub Kegiatan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	15 Dokumen	30.000.000	
4)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	200 Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	
5)	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200 Laporan	1.010.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	
6)	Sub Kegiatan Pengendalian	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil	2 Laporan	80.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program KKBPK	ra	Pengendalian Program KKBPK			Program KKBPK	egara	Pengendalian Program KKBPK			
7.2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Banjarneg ara	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	859.000.000	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Banjarn egara	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	25.000.000	
1)	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Banjarnega ra	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	17.115 Kader	859.000.000	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Banjarn egara	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	17.115 Kader	25.000.000	
7.3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarneg ara	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon	56 Faskes	2.680.470.000	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarn egara	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon	56 Faskes	180.000.000	
1)	Sub Kegiatan Pengendalian	Kab. Banjarnega	Jumlah Laporan Pengendalian	330 Laporan	450.390.000	Sub Kegiatan Pengendalian	Kab. Banjarn	Jumlah Laporan Pengendalian	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	ra	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya			Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	egara	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya			
2)	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.648 Orang	2.132.080.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72 Orang	100.000.000	
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6 Laporan	25.000.000	
4)	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan	4 Laporan	48.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan	Kab. Banjarnegara	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan	4 Laporan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
5)	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	84 Orang	25.000.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	84 Orang	25.000.000	
7.4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	852.650.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	
1)	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.810.000	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2)	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	54 Kampung KB (865 Kali)	848.840.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	-	-	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Banjarnegara	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,03%	5.397.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Banjarnegara	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,03%	230.000.000	
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	61,54%				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	61,54%	-	
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	36,74%				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	36,74%	-	
			Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan	50,76%				Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan	50,76%	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri					Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri			
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	30%				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	30%	-	
8.1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	32 Kelompok	458.400.000	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	32 Kelompok	230.000.000	
			Jumlah Kelompok UPPKS yang difasilitasi	20 Kelompok				Jumlah Kelompok UPPKS yang difasilitasi	3 Kelompok		
1)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	2 Laporan (Saka Kencana, Duta Genre)	80.000.000	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	2 Laporan (Saka Kencana, Duta Genre)	80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
2)	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	32 Laporan	38.400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-	
3)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	300.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	
4)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan		20.000.000	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan		100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)			
5)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		20.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Banjarnegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		25.000.000	
6)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Banjarnegara	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi		25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keluarga/UPPKS).		Keluarga/UPPKS)			Keluarga/UPPKS)		Keluarga/UPPKS)			
8.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berperan serta dalam Pembangunan keluarga	3 Organisasi	4.939.200.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banjarnegara	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang berperan serta dalam Pembangunan keluarga	-	-	
1)	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kab. Banjarnegara	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	10 Bulan	2.352.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kab. Banjarnegara	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	-	-	
2)	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja	Kab. Banjarnegara	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon	50.000 Laporan	2.587.200.000	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk	Kab. Banjarnegara	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan			remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan			

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Evaluasi perkembangan desa berdasarkan IDM untuk dilaksanakan pendampingan dan pengawalan agar peningkatan strata desa bisa maksimal;
2. Penyusunan secara bertahap untuk difasilitasi agar nantinya seluruh desa memiliki informasi batas desa geospasial;
3. Pada Tahun 2025 terdapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 197 Desa pada 20 Kecamatan, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun maka pemilihan kepala desa serebtak tahun 2025 menjadi tidak ada (diundur);
4. Penyusunan Grand Design Kependudukan agar bisa dilaksanakan Tahun 2025, agar menjadi dasar penyusunan program kerja periode Renstra Kepala Daerah terpilih selanjutnya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
1.	Nisran	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	banyak terjadi kecelakaan karena minimnya penerangan jalan Kabupaten	Jalan Raya Rakitan-Kaliurip (Jalan Kabupaten) Ruas Jalan Magangan-Pucungsari (Ds.Rakitan), Kab. Banjarnegara
2.	Hery Setyo Pranadi, SE	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	banyak pelaku umkm yang belum memiliki tempat untuk	DESA PETAMBAKN RT04 RW01, Kab.

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
		dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	memasarkan hasil usahanya	Banjarnegara
3.	SARMIN	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	belum adanya pendidikan dan teknologi tepat guna di desa	Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan, Kab. Banjarnegara
4.	SARMIN	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan potensi di desa	Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan, Kab. Banjarnegara
5.	SARMIN	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Butuh peralatan engolahan hasil pertanian	Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan, Kab. Banjarnegara
6.	SARMIN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kurangnya pelatihan untuk lembaga - lembaga Desa	Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan, Kab. Banjarnegara
7.	SUPRIYONO, S.Pd.SD	Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	Pengurus BUMDes masih belum mampu membuat laporan keuangan	BUMDes Tampomas Giri Mulya Desa Gentansari, Kab. Banjarnegara
8.	SUPENI	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	masih perlunya lembaga desa seperti Karang taruna dan PKK yang membutuhkan pengetahuan mengenai tugas dan perannya dalam pemerintahan Desa	Desa Beji Kecamatan Pandanarum, Kab. Banjarnegara
9.	SUPENI	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	masih kurangnya pengetahuan perihal bidang usaha ekonomi khususnya bagi perempuan di perdesaan	Desa Beji Kecamatan Pandanarum, Kab. Banjarnegara
10.	SUPENI	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Masih minimnya pendapatan Asli Desa karena kurangnya pengetahuan mengenai manajemen usaha ekonomi sebagai peningkatan	Desa Beji Kec. Pandanarum, Kab. Banjarnegara

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
		Desa	kesejahteraan masyarakat dan PADEs	
11.	SUPENI	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Masih perlunya pengetahuan tentang manajemen BUMdesa bagi para pengelola Bumdesa	Desa Beji Kecamatan Pandanarum, Kab. Banjarnegara
12.	KUSWOYO	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum adanya jalan dan jembatan penghubung permanen dalam wilayah RT 001 RW 07, sebagian jalan masih tanah	Dusun II - RT 001 RW 07 (Punthuk), Kab. Banjarnegara
13.	Toto Sugianto	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jembatan Gantung / kayu yang ada tidak dapat dilewati kendaraan roda 4	Desa Karangkemiri Dusun I RT 006 RW 002 dan dusun 2 RT 002 RW 004, Kab. Banjarnegara
14.	Susilo Jatmiko	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pembangunan drainase dan gorong-gorong sehingga air meluap ke badan jalan kabupaten	RW 01 Desa Karangjambe, Kab. Banjarnegara
15.	Supardaya	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga yang ada didesa membutuhkan peningkatan Kapasiltas	desa Candiwulan, Kab. Banjarnegara

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
1.	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kurangnya fasilitas karang taruna	Karang Taruna Presma Desa Kallunjar Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
2.	Ryan Aditya Wahyu P, S.Km	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan, seperti RT, RW, Karangtaruna, Posyandu dan PKK, kapasitas Kelembagaannya masih perlu ditingkatkan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RT, RW, Posyandi, PKK dan karangtaruna di Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Sigaluh dan Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
3.	Drs.Bambang Prawoto Sutikno	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Lembaga masyarakat seperti karangtaruna, Posyandu, PKK, RT, RW, kapasitas kelembagaanya masih belum optimal	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di kec.Wanadadi, Punggelan dan Rakit, Kab. Banjarnegara
4.	Slamet Riyadi S.Pd. I	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Kapasitas kelembagaan Masyarakat desa masih perlu	Peningkatan Kasaitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, di kec. Kalibening,

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	ditingkatkan	Pandanarum, Karangkobor dan wanayasa, Kab. Banjarnegara
5.	Dyah Windarti M, A.Md	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	kapasitas lembaga kemasyarakatan desa masih rendah	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kmesyrakatan Desa di kec. Punggelan, Wanadadi dan Rakit , Kab. Banjarnegara
6.	Marno	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kurangnya Sarpras Yang Memadai	Hibah untuk Sarpras Bidang Olahraga, kepada Pemuda atau Karang Taruna Desa Asinan Kecamatan kalibening Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
7.	Wahju Djatmika AL. BS	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa)	Kurangnya Modal untuk Pengembangan BumDes	BankeuDes untuk Penambahan Modal Usaha BUMDes Ngudi Makmur Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara , Kab. Banjarnegara
8.	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga	perlu peningkatan kapasitas LKM	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
		Kemasyarakatan		
9.	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan)	perlu peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara
10.	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ...)	perlunya peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
11.	Arya Achmad Zakaria, S.H., M.H	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ...)	perlunya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara
12.	Ach Samsul Bahri Al YTugiyono	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan)	perlunya peningkatan Kapasitas lembaga masyarakat di Desa	Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
13.	Anwar, ST.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,	Kurangnya Dana untuk Pemberdayaan Kelompok	Hibah untuk pembelian Sound System, Kepada Karangtaruna

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
		RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan)		Krida Remaja Desa Glempong Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
14.	Lilis Ujianti, S. Ag., M.Pd	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan)	Kurangnya fasilitasi terhadap posyandu	Posyandu Desa Bondolharjo Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara
15.	H. Bambang Suparno	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan)	Sarpras RT 05 RW 01 Desa Kalitengah Purwanegara Kurang memadai	RT 05 RW 01 Desa Kalitengah Purwanegara, Kab. Banjarnegara
16.	H. Dedi Suromli, S.Pd	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan)	Dibutuhkan peningkatan kapasitas LKD untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat	Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
17.	M GURUH DA PAMUJI	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Kurangnya sumur bor untuk pemenuhan air bersih warga	Pembuatan sumur BOR kelurahan Rejasa Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara

No	Pengusul	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Permasalahan	Lokasi
1	2	3	4	5
		Adat (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan)		
18.	Ryan Aditya Wahyu P, S.Km	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa)	BUMDesa Desa Kalilunjar belum memiliki Sekretariat untuk menunjang kegiatan kelembagaan	Bankeudes untuk Pembangunan baru Sekretariat BUMDesa Desa kalilunjar Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
19.	Ryan Aditya Wahyu P, S.Km	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa)	BUMDesa Desa Kalilunjar belum memiliki Sekretariat untuk menunjang kegiatan kelembagaan	Bankeudes untuk Pembangunan baru Sekretariat BUMDesa Desa kalilunjar Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
 - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
 - e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi
 - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - b. Pengembangan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara
 - d. Pembangunan wilayah Kalimantan
 - e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
 - f. Pembangunan wilayah Maluku;
 - g. Pengembangan wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;

- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Transformasi digital.
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - c. Pembangunan rendah karbon
 7. Memperkuat stabilitas polihukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Selain urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara juga mengampu urusan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nomor 55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010. Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berisi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yaitu Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan Informasi data mikro. Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di kabupaten/kota, dan bisa juga dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan Program keluarga Berencana.

Berdasarkan Renstra BKKBN 2020-2024 target kinerja mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam RPJMN 2019-2024. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan BKKBN untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

Dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 huruf N disebutkan pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dibagi ke dalam 3 sub urusan yaitu:

1. sub urusan pengendalian penduduk;
2. sub urusan keluarga berencana;
3. sub urusan keluarga sejahtera.

Pada sub urusan pengendalian penduduk, pemerintah pusat melalui BKKBN dan Perwakilan BKKBN di Provinsi melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan juga penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan inipun dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan di tingkat provinsi perkiraan pengendalian penduduk tidak diberikan kewenangannya melainkan menjadi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi. Pada level pemerintah kabupaten juga hanya melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk selain pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan.

Pada sub urusan keluarga berencana, pemerintah pusat melalui BKKBN memiliki 5 (lima) urusan menyangkut:

1. Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi-KIE pengendalian penduduk;
2. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
3. Pengelolaan dan penyediaan alokon untuk kebutuhan PUS;
4. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Dari 5 (lima) urusan yang dilaksanakan pemerintah pusat, yang diserahkan kewenangan urusannya kepada pemerintah daerah provinsi sebanyak 2 (dua) urusan yaitu:

1. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, KIE dan pemberdayaan;
2. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Sedangkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan yang diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 (empat) urusan yaitu:

1. Pelaksanaan advokasi-KIE pengendalian kependudukan;
2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
3. Pengendalian dan pendistribusian alokon ;
4. Pelaksanaan pelayanan KB di daerah juga memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.

Pada sub urusan keluarga sejahtera kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sama sebanyak 2 (dua) kewenangan hanya saja memiliki tingkat kewenangan yang berbeda dimana pusat melakukan pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga, provinsi melakukan pengelolaan pelaksanaan desain tersebut dan Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan.

Pada sub urusan standardisasi dan sertifikasi hanya berada di tingkat pusat berupa standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB.

Dari pembahasan di atas jelas terlihat bahwa program pengendalian penduduk dan keluarga merupakan urusan wajib yang terbagi merata (konkuren) dari tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini masih memberi batasan dalam hal kewenangan dari pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti berikut ini:

1. Kewenangan bagi pemerintah pusat namun tidak diserahkan ke pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi PLKB/PKB serta pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
2. Kewenangan bagi pemerintah pusat bukan kewenangan bagi pemerintah provinsi namun menjadi kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota yaitu mengenai distribusi alokon dan pelaksanaan pelayanan KB;
3. Kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan tingkatan kewenangan yang berbeda seperti:
 - a) pemerintah pusat melakukan penyusunan, pemerintah provinsi melakukan pengembangan dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pelaksanaan;
 - b) pemerintah pusat melakukan penetapan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemetaan;
 - c) pemerintah pusat melakukan pengelolaan, pemerintah kabupaten/kota melakukan pendayagunaan.

Dari rincian pelaksanaan urusan pemerintahan ini sudah sangat jelas, Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberi garis yang lebih tegas lagi didalam melaksanakan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara

- a) Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - 3) Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.
- b) Sasaran Jangka Menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

- 1) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR);
- 4) Meningkatnya kualitas layanan masyarakat.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara merupakan program prioritas dalam Renstra Tahun 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp13.257.322.930,00 yang terbagi dalam 8 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Pilihan untuk masing-masing program / kegiatan sebagai berikut :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terbagi dalam 6 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari satu sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Penataan Desa, terdiri dari satu kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, terdiri dari satu sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
- c. Program Peningkatan Kerjasama Desa, terdiri dari satu kegiatan :
 - 1) Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa, terdiri dari satu sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 Program administrasi pemerintahan desa terdiri dari 8 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Terbagi dalam 3 sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - c) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
 - d) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa;
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa;
 - f) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
 - g) Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - h) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan

1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk, terbagi dalam dua kegiatan

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, terdiri dari satu sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari satu sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan keluarga berencana (KB) terdiri dari tiga kegiatan yang diarahkan pada

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - a) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - b) Sub Kegiatan KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal
- 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan didukung 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP;
 - c) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - d) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - e) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan;

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keliarga Sejahtera (KS)

BAB V. PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dispermades PPKB sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama jangka waktu Tahun Anggaran 2024. Rancangan Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan manajemen dan staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara guna mendukung pencapaian sasaran.

Rancangan Renja SKPD disusun selain mengacu pada RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, Renstra OPD dan RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026 juga melihat isu-isu penting pada skala nasional maupun provinsi yang berkaitan dengan pelayanan SKPD. Renja disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan pembangunan, yang nantinya terangkum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Sesuai dengan usulan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa sampai dengan Kabupaten maka Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar

kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia sangatlah penting dalam pencapaian target dengan segala keterbatasan sumberdaya yang ada.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Banjarnegara, RPJMD Kabupaten Banjarnegara, RKPD Kabupaten Banjarnegara dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya manusia maupun anggaran dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja;
2. Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi dengan Perangkat Daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

4. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Dokumen Renja Dispermades PPKB Tahun 2024 yang kami susun ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Awal Tahun 2025 Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara,



Hendro Cahyono, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681130 199703 1 007